



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 98 /404.101.2/B/2022

TENTANG

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2022 – 2024

BUPATI NGAWI,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan dan menjaga pergerakan inflasi daerah pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 - 2024

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/54/404.101.2/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 – 2024 dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, sub program, indikator serta target capaian dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 merupakan rencana aksi strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi yang dilakukan sebagai panduan dan pedoman pelaksanaan tugas pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Ngawi mengacu kepada strategi kunci 4 K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim Pengendalian  
Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/ 98 /404.101.2/B/2022  
 TANGGAL : 3 Februari 2022

TABEL ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 TAHUN 2022 - 2024

4K	Program Strategis	Program Kerja	Indikator	Timeline Target			Dinas/Instansi
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1. Optimalisasi Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga 10 komoditas bahan pangan strategis	Jumlah Pemantauan harga dan stok barang di tingkat distributor 24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok yang difasilitasi infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang disediakan 4 Gapoktan	4 Gabungan Kelompok Tani	3 Gabungan Kelompok Tani	4 Gabungan Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3. Koordinasi, Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan hasil Pemantauan harga dan stok barang di tingkat distributor yg di tindaklanjuti	20 kali	20 kali	20 kali	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
		4. Pemantauan harga dan stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan	Jumlah laporan hasil Pemantauan harga dan stok barang di tingkat distributor yg di tindaklanjuti	26 kali	26 kali	26 kali	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stabilisasi Harga	Informasi Deteksi Aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang Ekonomi	Pembuatan produk intelejen berupa pemantauan harga sembako	12 kali	12 kali	12 kali	Kepolisian Resort Ngawi
	Mengelola Permintaan	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah kelompok yang difasilitasi bantuan peralatan perontok jagung dan gabah	1 Kelompok Tani	3 Kelompok Tani	3 Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Ketersediaan Pasokan	Memperkuat Produksi dan Peningkatan Produksi Pertanian Unggulan daerah	<p>1. Peningkatan produksi tanaman pangan (melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman)</p> <p>a. Optimalisasi Pemetaan Lahan (LP2B-Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dengan memastikan saprodi, alsintan, sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan penanganan panen serta pasar</p> <p>b. Penggunaan benih bersertifikat, unggul dan bermutu serta adaptif terhadap perubahan iklim</p> <p>c. Manajemen Tanaman Sehat</p> <p>d. Pemantauan luas serangan OPT/DPI (Sekolah Lapang (SL)</p> <p>e. Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman pangan dan hortikultura (Pendampingan Intensif dan SL)</p> <p>f. Optimalisasi lahan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi</p> <p>g. Pemetaan daerah rawan banjir, kekeringan, organisme pengganggu tumbuhan</p> <p>h. Pengembangan early warning system (OPT, Luas Panen, Banjir, Kekeringan, Harga) antara lain berkoordinasi melalui pemantauan kondisi iklim dengan sumber harian data BMKG (<a href="http://www.bmkg.go.id">www.bmkg.go.id</a>);</p>	Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian Unggulan Daerah	0,15 %	0,15 %	0,15 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
		i. Optimalisasi Brigade Alat Mesin Pertanian (Alsintan) j. Pengembangan kawasan/kampung GEMAPARUT k. Pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					
		2. Ngawi Organik	Luas tanam pertanian organik yang dibudidayakan	250 Ha	500 Ha	750 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3. Menjaga kontinuitas pasokan a. Optimalisasi penggunaan kalender tanam b. Peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi dan peningkatan indeks pertanaman c. Pemantauan luas tanam bulanan sesuai kebutuhan d. Pengembangan kawasan rumah pangan lestari e. Pengembangan ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan Lumbung pangan masyarakat	Jumlah pemantauan stok pasokan dan harga pangan ditingkat produsen dan konsumen	24 kali	24 kali	24 kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		4. Peningkatan produksi ternak a. Optimalisasi pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan b. Optimalisasi pusat kesehatan hewan serta tenaga kesehatan hewan c. Pengembangan lab kesehatan hewan untuk mendukung penyidikan Penyakit Hewan Menular (PHM) d. Vaksinasi AI / Flu Burung dan desinfeksi e. Optimalisasi rumah potong hewan yang memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) f. Pengawasan obat hewan g. Pembinaan kelompok tani pembudidaya ternak h. Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Persentase peningkatan produksi peternakan	1%	1%	1%	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
		i. Sosialisasi dan Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)					
		5. Peningkatan Produksi Perikanan a. Pengelolaan penangkapan ikan b. Pemberdayaan nelayan kecil c. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil d. Pengelolaan pembudidaya ikan e. Pengawasan sumber daya perikanan f. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan g. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha penolahan	Persentase peningkatan produksi perikanan	5%	5%	5%	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Ngawi
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP Nasional	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten	10 Ton	10 Ton	10 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penguatan Kelembagaan	1. Sosialisasi dan himbauan kepada petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi AUTP yang Ditindak Lanjuti	19 kali	19 kali	19 kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang	Jumlah Gabah yang disimpan dalam system Resi Gudang	1500 ton	1500 ton	1500 ton	Perusahaan Daerah Sumber Bhakti
		3. Perluasan implementasi Kartu Tani	Jumlah Kartu tani diterimakan	119.785 buah	119.800 buah	119.850 buah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		4. Mendorong transisi kelembagaan petani menjadi lembaga ekonomi petani a.l melalui contract farming	Jumlah Gapoktan/poktan yang Melakukan Kontrak Farming	45 Gapoktan/poktan	52 Gapoktan/poktan	65 Gapoktan/poktan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		5. Optimalisasi BUMDES dalam ketersediaan pasokan	Jumlah BUMDES yang mempunyai unit usaha Agrobisnis Aktif	206 BUMDES	210 BUMDES	213 BUMDES	Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan UKM	30 orang	30 orang	30 orang	Dinas Koperasi
		7. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	Persentase UKM yang diberikan dukungan pembiayaan	25%	25%	25%	Dinas Koperasi
			Persentase koperasi yang direstrukturisasi	25%	25%	25%	Dinas Koperasi
		8. Pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pasca Panen yang di Tindak Lanjuti	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		9. Penataan Agribisnis melalui cooperative farming	Jumlah Lembaga Agribisnis yang aktif	4 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		10. Pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri pangan	Jumlah Komoditi Hasil Pertanian local dimanfaatkan sebagai bahan baku Industri Pangan	10 Komoditi	12 Komoditi	14 Komoditi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	1. Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, a.l dengan mengoptimalkan peran swasta/BUMD/KPD (Kantor Perwakilan Dagang) dan swasta	Jumlah Dokumen Kerjasama yang di Tindak Lanjuti	2 BUMD/3 Perusahaan Beras/ 1 Koperasi Tani	2 BUMD/3 Perusahaan Beras/Koperasi Tani	2 BUMD/3 Perusahaan Beras/1 Koperasi Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi distribusi Pangan Pokok yang ditindaklanjuti	2 Kali	2 Kali	3 Kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Prosentase Infrastruktur perlengkapan jalan yang sesuai fungsi	98%	99%	100%	Dinas Perhubungan
		4. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Prosentase sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang sesuai fungsi	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
		5. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas	Prosentase rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi sesuai standart	97%	98%	99%	Dinas Perhubungan
		6. Layanan Pengaturan, Penjagaan, pengawalan dan patroli	Rapat koordinasi pelaksanaan operasi kepolisian menjelang Hari Raya besar/Nasional guna menjamin kelancaran arus distribusi sembako	2 kali	2 kali	2 kali	Kepolisian Resort Ngawi
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	1. Peningkatan pemasaran produk pelaku UKM melalui kerjasama pemanfaatan digital platform dalam hal distribusi produk	Jumlah UMKM yang terfasilitasi melalui market place dengan platform digital	25 %	30%	35%	Dinas Koperasi, UKM
		2. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP (Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di tera/tera ulang	18.050 UTTP	18.100 UTTP	18.150 UTTP	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
		3. Revitalisasi fisik pasar dan pembangunan pasar	Jumlah Pasar yang Ber SNI	2 pasar	2 Pasar	2 Pasar	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	329 M	336 M	338 M	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
		5. Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Persentase penerbitan TDG sesuai SOP	98 %	99 %	100 %	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
		6. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
	Inovasi	Pembelian Beras Organik bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ngawi	Jumlah Beras Organik yang tersalurkan dalam satu tahun	450 ton	495 ton	545 ton	Dinas Pertanian, DPMDes, BUMD, Gapoktan/BU MDes
Komunikasi Efektif		Optimalisasi sistem informasi pemantauan harga (SISKAPERBAPO dan PIHPS) sebagai Early Warning System yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk data stok.	Jumlah Dokumen harga dan stock barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya yang tersedia Update	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Pusat dan Daerah	1. Kampanye anti pemborosan pangan dan pengurangan food waste (sisa makanan)	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Food Waste yang ditindaklanjuti	2 TL	2 TL	3 TL	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Optimalisasi media (cetak, elektronik dan internet) sebagai tools menjaga ekspektasi masyarakat khususnya pada saat HBKN.	Jumlah Media yang memberitakan Informasi Pangan	4 TV regional, 1 Sta Radio, 8 Media cetak Harian 20 media cetak berkala, 9 media online, 8 majalah bulanan	4 TV regional, 1 Sta Radio, 8 Media cetak Harian 20 media cetak berkala, 9 media online, 8 majalah bulanan	4 TV regional, 1 Sta Radio, 8 Media cetak Harian 20 media cetak berkala, 9 media online, 8 majalah bulanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		3. Penguatan komitmen pimpinan daerah dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya pengendalian inflasi daerah.	Jumlah Hasil Rakor TPID yang Ditindaklanjuti	24 TL	24 TL	24 TL	Bag. Perekonomian
		4. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi Kabupaten	Jumlah Regulasi Peta Jalan yang disusun	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	Bag. Perekonomian
		5. Peningkatan kehandalan TPID melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi	Jumlah Personil TPID yang mengikuti Bimtek	45 orang	45 orang	45 Orang	Bag. Perekonomian
		6. Penguatan koordinasi dan sinergi TPID melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang lebih intensif	Jumlah Personil yang mengikuti HLM tingkat Kabupaten	24 orang	24 orang	24 orang	Bag. Perekonomian

1	2	3	4	5	6	7	8
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	1. Penyusunan produk kebijakan pengendalian inflasi yg kredibel sebagai tindak lanjut komunikasi dan koordinasi antar stakeholder untuk menjaga pola ekspektasi dan psikologis konsumen	Jumlah Produk Kebijakan Pengendalian Inflasi yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Bag. Perekonomian
		2. Publikasi melalui website, media sosial, videotron, flyer dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN)	Jumlah publikasi yang terlaksana	10 kali	10 kali	10 kali	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO